



**PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

**RENCANA KERJA
(RENJA)
2026**

**KECAMATAN
WATANG SIDENRENG**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG
KECAMATAN WATANG SIDENRENG**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita telah dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2026. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2026 ini merupakan bentuk perencanaan Kecamatan Watang Sidenreng dalam 1 tahun kedepan, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Rencana Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Program Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini mungkin ditemui data, informasi dan cara penyajian yang belum optimal, untuk itu atas kekurangan dan kelemahan Renja Kecamatan Watang Sidenreng masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Empagae, 3 September 2025



KAMAT WATANG SIDENRENG

H. ARNOLD BARAMULI, ST.,M.Adm.KP.
NIP. 197302082008021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 2

 1.3. Maksud dan Tujuan 3

 1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 4

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
 Perangkat Daerah 4

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 10

 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 12

 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 15

 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 22

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 23

 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 23

 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 24

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 25

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 25

BAB V P E N U T U P 44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Watang Sidenreng yang selanjutnya disebut RENJA adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Kecamatan Watang Sidenreng, pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan Perangkat Daerah yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kecamatan Watang Sidenreng dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pemberian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya pengembangan keamanan dan ketertiban umum
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin komplit tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian ditingkat Kecamatan yang

dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrembang baik ditingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan Camat membuat Renstra kepada Bupati.

Sebagai aplikasi dari uraian diatas, maka perlu disusun suatu Rencana Kerja (Renja) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang meliputi Demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah merupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana kerja Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2026 ini yang diorientasikan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Sidenreng Rappang di Kecamatan Watang Sidenreng dalam rangka mencapai masyarakat mandiri, demokratis produktif, maju, aman, tertib dan budaya. Selanjutnya Rencana kerja yang telah disusun akan diimplementasikan dan merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan Kecamatan Watang Sidenreng untuk rentang waktu Tahun 2026

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Watang Sidenreng tahun 2026 antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025–2029
8. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng
Rappang No. 14 Tahun 2025

.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPD 2024-2026 dan Renstra Kecamatan Watang Sidenreng Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 terutama yang terkait dengan dengan Urusan Pemerintahan

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Watang Sidenreng adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2026 serta sebagai penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Watang Sidenreng untuk jangka waktu satu tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja merupakan program kerja kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya dan menjadi bagian dari Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2024 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang mencakup Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat terdiri dari satu Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan, memiliki relisasi yang sangat minim pada Renja 2024 yaitu 0% dari target sebesar 100%
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang mencakup Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan serta Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan, telah mencapai realisasi Renja 2024 sebesar 96,88% dari target sebesar 100%
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mencakup Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari tiga Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, telah mencapai realisasi Renja 2024 sebesar 80% dari target sebesar 100%
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, telah mencapai realisasi Renja 2023 sebesar 95,32% dari target sebesar 100%

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum mencakup Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, telah mencapai realisasi Renja 2024 sebesar 100% dari target sebesar 100%

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun 2024 dan pencapaian Renstra s/d tahun 2024 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada *(Tabel T-C.29.)*

**TABEL TC-29. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

OPD : KECAMATAN WATANG SIDENRENG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)	Target Kinerja Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Capaian Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	Tingkat Capaian Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum			Persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik (%)	100	100	100			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100,00	0,00	100,00	0,00		
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (%)	100	0,00	100	0,00%	2,78%	2,78%
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	36	0	8	1	1	2,78%
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100,00	0,00	100,00	0,00		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (%)	100	0,00	100	0,00%	16,67%	16,67%

		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	0	4	2	2	16,67%
2	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat			Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik (%)	100	100	100			
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100,00	0,00	100,00	0,00		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100	0,00	100	0,00%	8,33%	8,33%
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36	0	5	3	3	8,33%
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100	0,00	100	0,00%	12,87%	12,87%
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	45	0	4	4	4	8,89%
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28	0	3	0	0	0,00%
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	54	0	15	5	5	9,26%
		7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	9	0	6	3	3	33,33%
3	Meningkatnya kualitas layanan urusan Pembinaan dan pengawasan			Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik (%)	100	100	100			

		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100,00	0,00	100,00	0,00		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	0,00	100	0,00%	20,00%	20,00%
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15	0	6	3	3	20,00%
		7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	15	0	6	3	3	20,00%
4	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan			Predikat Nilai Sakip (%)	70,27	60,20	65,17			
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100,00	0,00	100,00	0,00		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	0,00	100	0,00%	11,06%	11,06%
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,356	0	350	150	150	11,06%
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	0,00	100	0,00%	15,75%	15,75%
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	105	0	40	24	24	22,86%
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24	0	8	4	4	16,67%
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	0	12	6	6	10,00%
		7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	96	0	48	24	24	25,00%

		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	565	0	48	24	24	4,25%
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	0,00	100	0,00%	25,00%	25,00%
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24	0	54	0	0	0,00%
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	0	18	2	2	50,00%
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	0,00	100	0,00%	46,00%	46,00%
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	514	0	48	24	24	4,67%
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	0	48	24	24	66,67%
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	0	48	24	24	66,67%
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	0,00	100	0,00%	47,41%	47,41%
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27	0	6	3	3	11,11%
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	0	20	10	10	111,11%
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	0	5	3	3	20,00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan ketidak mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada pada Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan / sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Dalam mencapai Kinerja Pelayanan Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2026 berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Watang Sidenreng merupakan bagian Integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Watang Sidenreng berikut ini : *(Tabel T-C.30.)*

TABEL TC-30. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD : KECAMATAN WATANG SIDENRENG

No	Indikator	Satuan	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persen	91	92	93	94	95	96	90	91	92	93	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	77,59 (C)	78,61 (B)	79,82 (B)	81,55 (B)	82,78 (B)	83,75 (B)	75,309 (C)	77,59 (C)	78,61 (B)	79,82 (B)	
3	Predikat Nilai SAKIP	Kategori	60 (B)	61 (B)	62 (B)	63 (B)	64 (B)	65 (B)	59,45 (CC)	60 (B)	61 (B)	62 (B)	
4	Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dijalankan Dengan Baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Kegiatan Yang Dikooordinasikan Di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Jumlah Desa Yang Dibina Dan Diawasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	Persen	92	93	94	95	96	97	91	92	93	94	
9	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain, pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan. Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c) Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat;
- d) Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
- e) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten;
- f) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.

Diperlukan sebuah perencanaan program yang komprehensif dan sustainable/berkelanjutan terkait peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah baik dari sisi kemampuan teknoratis, kedisiplinan, kepekaan/responsiveness, serta keberanian dan semangat untuk melakukan improvisasi dan inovasi agar semua kegiatan yang dilaksanakan efektif, efisien, tepat sasaran dan partisipatif sehingga mencapai ekspektasi capaian kinerja yang diharapkan. Sejalan dengan rencana pembangunan nasional, pengarusutamaan MDGs juga harus dilakukan dalam proses perencanaan di tingkat daerah. Pengarusutamaan MDGs dalam pembangunan daerah diarahkan untuk dapat menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan karakteristik masing-masing daerah. Penyusunan Renstra PD dan Renja PD Kecamatan Watang Sidenreng memuat kebijakan, program dan kegiatan yang terukur dalam mendukung pencapaian MDGs dan dilengkapi dengan capaian, indikator kinerja dan pendanaan untuk setiap program dan kegiatan. Pemerintah Provinsi telah mengarahkan dan memastikan bahwa penyusunan Renja PD dan RKA Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sasaran dan indikator kinerja yang mendukung pencapaian MDGs. Melalui cara ini pencapaian target MDGs tingkat nasional dapat diwujudkan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGS) adalah:

- 1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
- 2. Keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat

3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
4. Pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Watang Sidenreng bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatuhan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan, pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan company/cooperate sosial resposipility (CSR), maka Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Pelayanan prima Kecamatan sebagai salah satu di pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut, maka diperlukan standar Pelayanan yang secara nonaktif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
4. Peningkatan Kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sabagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

Lingkup analisis Kinerja pelayanan di Kecamatan Watang Sidenreng meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

A. Lingkungan Internal

Peluang:

1. Kekuatan Hukum tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan
2. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
3. Kewenangan koordinasi ditingkat Kecamatan
4. Adanya sarana dan prasarana

Tantangan:

1. Kualitas SDM yang belum memadai
2. Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan Kecamatan yang diakibatkan belum jelasnya target sasaran yang merupakan ukuran pencapaian yang ingin dicapai
3. Belum optimalnya data-data kondisi ekonomi sosial dan budaya yang menjadi bahan analisis dalam perumusan perencanaan ditingkat Kecamatan

B. Lingkungan Eksternal

Peluang:

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
2. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
3. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan Kecamatan
4. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
5. Diklat peningkatan kualitas aparatur
6. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
7. Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram.

Tantangan:

1. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
2. Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya

3. Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat
4. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
5. Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan Dokumen Perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. Program prioritas pembangunan daerah dan
3. Rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja, pendanaan, dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Watang Sidenreng berdasarkan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah se Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Watang Sidenreng.

Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada *Tabel T-C.31*.

**TABEL TC-31. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

OPD : KECAMATAN WATANG SIDENRE

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING	
	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN			KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	UNSUR KEWILAYAHAN												
	KECAMATAN												
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Watang Sidenreng	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%		500,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Watang Sidenreng	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%		500,000	
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec.Watang Sidenreng	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%		500,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec.Watang Sidenreng	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%		500,000	
1.1. 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12	Laporan	500,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12	Laporan	500,000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Watang Sidenreng	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%		50,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Watang Sidenreng	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%		50,000,000	
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%		50,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%		50,000,000	

2.1. 1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Laporan	50,000,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Laporan	50,000,000	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Watang Sidenreng	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%		399,064,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Watang Sidenreng	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%		399,064,000	
3.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Watang Sidenreng	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%		500,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Watang Sidenreng	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%		500,000	
3.1. 1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	500,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	500,000	
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec.Watang Sidenreng	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%		398,564,000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec.Watang Sidenreng	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%		398,564,000	
3.2. 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Empagae/ Kel. Sidenreng / Kel. Kanyuara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3	Lembaga Kemasyrakatan	7,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Empagae/ Kel. Sidenreng/ Kel. Kanyuara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3	Lembaga Kemasyrakatan	7,000,000	

3.2. 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Empagae/ Kel. Sidenreng / Kel. Kanyuara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	Unit	373,064,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Empagae/ Kel. Sidenreng/ Kel. Kanyuara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	Unit	373,064,000	
3.2. 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Empagae/ Kel. Sidenreng / Kel. Kanyuara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Laporan	18,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Empagae/ Kel. Sidenreng/ Kel. Kanyuara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Laporan	18,000,000	
3.2. 4	Evaluasi Kelurahan	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12	Laporan	500,000	Evaluasi Kelurahan	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12	Laporan	500,000	
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Watang Sidenreng	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%		1,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Watang Sidenreng	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%		1,000,000	
4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Watang Sidenreng	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%		1,000,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Watang Sidenreng	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%		1,000,000	
4.1. 1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	Dokumen	500,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	Dokumen	500,000	

4.1. 2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12	Dokumen	500,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12	Dokumen	500,000	
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec.Watang Sidenreng	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		2,989,984,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec.Watang Sidenreng	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		3,249,743,870	
5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Watang Sidenreng	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		2,307,148,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Watang Sidenreng	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		2,566,907,870	
5.2. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	350	Org/Bln	2,307,148,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	350	Org/Bln	2,566,907,870	
5.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Watang Sidenreng	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		218,456,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Watang Sidenreng	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		218,456,000	
5.3. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	Paket	12,770,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	Paket	12,770,000	
5.3. 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	17,275,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	17,275,500	

5.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Laporan	12,748,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Laporan	12,748,000	
5.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Laporan	22,076,500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Laporan	22,076,500	
5.3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12	Laporan	42,459,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12	Laporan	42,459,000	
5.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	111,127,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	111,127,000	
5.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Watang Sidenreng	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%		108,568,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Watang Sidenreng	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%		108,568,000	
5.4.1	Pengadaan Mebel	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah paket mebel yang diadakan	8	Unit	7,192,000	Pengadaan Mebel	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah paket mebel yang diadakan	8	Unit	7,192,000	
5.4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	101,376,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	101,376,000	
5.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Watang Sidenreng	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		252,656,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Watang Sidenreng	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		252,656,000	
5.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	173	Laporan	2,925,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	173	Laporan	2,925,000	

5.5. 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	12	Laporan	52,700,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	12	Laporan	52,700,000	
5.5. 3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	197,031,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	197,031,000	
5.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Watang Sidenreng	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%		103,156,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Watang Sidenreng	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%		103,156,000	
5.6. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7	Unit	46,632,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7	Unit	46,632,000	
5.6. 2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	22	Unit	14,478,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	22	Unit	14,478,000	
5.6. 3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	5	Unit	42,046,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Watang Sidenreng	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	5	Unit	42,046,000	
JUMLAH						3,440,548,000						3,700,307,870	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Watang Sidenreng tahun 2026 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

- 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi wewenang Kecamatan dan Peningkatan kualitas aparaturnya.
- 2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
- 3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi ;
- 4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah. Telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Watang Sidenreng, maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Usulan program dan kegiatan di Kecamatan Watang Sidenreng tidak ada, terlampir pada tabel T-C.32

**TABEL TC-32. USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI
PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
N I H I L					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Keseimbangan pelaksanaan antara tugas pemerintahan daerah yang tercermin dalam asas desentralisasi dan tugas pemerintahan umum baik yang bersifat atributif maupun kewenangan yang dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Kemendagri telah mengeluarkan kebijakan penerapan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan). Program ini merupakan terobosan, sebagai cara untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem satu pintu pada tingkat kecamatan untuk mendorong kecepatan, transparansi dan keterukuran dengan menyediakan fasilitas ruang pelayanan yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Di dalam pelaksanaan Penyusunan Renja Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2026, telah mengikuti hasil sinkronisasi terhadap program prioritas nasional sebagaimana telah tertuang di dalam RKPD 2024 – 2026. Sesuai dengan tupoksi Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, sekaligus mengawal RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka Renja Kecamatan Watang Sidenreng lebih banyak berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat perencanaan makro untuk menunjang terlaksananya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sesuai dengan tupoksi Kantor Kecamatan Watang Sidenreng, sebagai SKPD yang hanya melaksanakan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan disamping melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, juga meliputi aspek koordinasi pada lingkup Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka Renja Kantor Kecamatan Watang Sidenreng lebih banyak berisi program dan kegiatan yang bersifat pelayanan pemerintahan untuk menunjang terlaksananya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Kerja adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Untuk mencapai misi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2026 yang akan diwujudkan oleh Kantor Camat Watang Sidenreng sebagai salah satu Perangkat Daerah pelaksana pencapaian misi tersebut maka Kantor Camat Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan tujuan tahun yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas, maka ditetapkan beberapa sasaran strategis yang akan ditempuh yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum
2. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawas
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kecamatan Watang Sidenreng dimana pada tahun 2026 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai C.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2026 setelah dilakukan penyesuaian dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 3) Evaluasi Kelurahan

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 2) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
2) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4.2. Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK A. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN A. Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan

2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan B. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3. Evaluasi Kelurahan	TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN A. Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan 1. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan B. Cakupan Kegiatann Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan 1. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM A. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM A. Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA A. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA A. Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

	A. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN B. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD C. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor D. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	A. Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN B. Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD C. Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan D. Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
--	---	---

	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

- 1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
- 2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan
- 3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial Budaya yang menjadi skala prioritas di masing-masing Desa/Kelurahan se Kecamatan Watang Sidenreng dan dijelaskan lebih rinci pada Tabel Rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut :

(Tabel T-C.33)

TABEL TC-33. RUMUSAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD : KECAMATAN WATANG SIDENRENG

NO.	RENCANA TAHUN 2026					SUMBER DANA	PERKIRAAN MAJU 2027					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA	
1	2	4	5		6		7	9	10		11	12
	UNSUR KEWILAYAHAN											
	KECAMATAN											
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%		500,000	DAU	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%		500,000	
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%		500,000	DAU	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%		500,000	
1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12	Laporan	500,000	DAU	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12	Laporan	500,000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%		50,000,000	DAU	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%		50,000,000	
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%		50,000,000	DAU	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%		50,000,000	

2.1. 1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Laporan	50,000,000	DAU	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Laporan	50,000,000	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%		5,000,000	DAU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%		5,000,000	
3.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%		500,000	DAU	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%		500,000	
3.1. 1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	500,000	DAU	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	500,000	
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%		4,500,000	DAU	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%		4,500,000	
3.2. 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyrakatan	4,000,000	DAU	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyrakatan	4,000,000	
3.2. 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	Unit	-	DAU	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	Unit	-	

3.2. 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Laporan	-	DAU	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Laporan	-	
3.2. 4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12	Laporan	500,000	DAU	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12	Laporan	500,000	
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%		1,000,000	DAU	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%		1,000,000	
4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%		1,000,000	DAU	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%		1,000,000	
4.1. 1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	Dokumen	500,000	DAU	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	Dokumen	500,000	
4.1. 2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12	Dokumen	500,000	DAU	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12	Dokumen	500,000	
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		2,857,807,870	DAU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		2,963,874,114	

5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		2,566,907,870	DAU	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		2,672,974,114	
5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	350	Org/Bln	2,566,907,870	DAU	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	350	Org/Bln	2,672,974,114	
5.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		122,822,000	DAU	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		122,656,000	
5.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	Paket	5,120,000	DAU	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	Paket	5,120,000	
5.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	17,275,500	DAU	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	17,275,500	
5.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Laporan	5,794,000	DAU	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Laporan	5,794,000	
5.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Laporan	12,628,000	DAU	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Laporan	12,662,000	
5.3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12	Laporan	21,450,000	DAU	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12	Laporan	21,450,000	
5.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	60,554,500	DAU	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	60,354,500	
5.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%		32,909,000	DAU	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%		48,575,000	

5.4.1	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan	-	Unit	-	DAU	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan	2	Unit	19,430,000	
5.4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	32,909,000	DAU	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	29,145,000	
5.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		73,125,000	DAU	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		73,125,000	
5.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12	Laporan	1,125,000	DAU	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12	Laporan	1,125,000	
5.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	12	Laporan	15,000,000	DAU	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	12	Laporan	15,000,000	
5.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	57,000,000	DAU	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	57,000,000	
5.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%		62,044,000	DAU	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%		46,544,000	
5.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3	Unit	25,158,000	DAU	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3	Unit	25,158,000	
5.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	22	Unit	5,952,000	DAU	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	22	Unit	5,952,000	

5.6. 3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	5	Unit	30,934,000	DAU	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	5	Unit	15,434,000		
JUMLAH					2,914,307,870							3,020,374,114	
KELURAHAN SIDENRENG													
1.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%		138,334,000	DAU	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%		134,146,000		
1.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	100%		138,334,000	DAU	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	100%		134,146,000		
1.2. 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyrakata n	1,000,000	DAU	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyrakata n	1,000,000		
1.2. 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	131,334,000	DAU	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	127,146,000		
1.2. 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Laporan	6,000,000	DAU	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Laporan	6,000,000		
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		123,666,000	DAU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		127,854,000		
2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		31,878,000	DAU	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraa n Administrasi Umum	100%		31,878,000		

								Perangkat Daerah				
2.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	Paket	2,550,000	DAU	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	Paket	2,550,000	
2.1.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Laporan	2,318,000	DAU	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Laporan	2,318,000	
2.1.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Laporan	3,149,500	DAU	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Laporan	3,149,500	
2.1.4	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12	Laporan	7,003,000	DAU	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12	Laporan	7,003,000	
2.1.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	16,857,500	DAU	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	16,857,500	
2.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%		17,407,000	DAU	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%		21,595,000	
2.2.1	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan	4	Unit	4,811,000	DAU	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan	2	Unit	16,095,000	
2.2.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	12,596,000	DAU	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	5,500,000	
2.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		59,677,000	DAU	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		59,677,000	
2.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	Laporan	600,000	DAU	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	Laporan	600,000	

		Surat menyurat						Surat menyurat					
2.3. 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	12	Laporan	12,400,000	DAU	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	12	Laporan	12,400,000		
2.3. 3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	46,677,000	DAU	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	46,677,000		
2.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%		14,704,000	DAU	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%		14,704,000		
2.4. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Unit	7,158,000	DAU	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Unit	7,158,000		
2.4. 2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8	Unit	3,842,000	DAU	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8	Unit	3,842,000		
2.4. 3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1	Unit	3,704,000	DAU	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1	Unit	3,704,000		
JUMLAH					262,000,000							262,000,000	
KELURAHAN KANYUARA													
1.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%		127,000,000	DAU	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%		127,000,000		

1.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%		127,000,000	DAU	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%		127,000,000	
1.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	1,000,000	DAU	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	1,000,000	
1.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	120,000,000	DAU	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	120,000,000	
1.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Laporan	6,000,000	DAU	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Laporan	6,000,000	
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		135,000,000	DAU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		135,000,000	
2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		31,878,000	DAU	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		31,878,000	
2.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	Paket	2,550,000	DAU	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	Paket	2,550,000	
2.1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Laporan	0	DAU	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	12	Laporan	0	

								Disediakan				
2.1. 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Laporan	2,318,000	DAU	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Laporan	2,318,000	
2.1. 4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Laporan	3,149,500	DAU	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Laporan	3,149,500	
2.1. 5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12	Laporan	7,003,000	DAU	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12	Laporan	7,003,000	
2.1. 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	16,857,500	DAU	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	16,857,500	
2.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%		29,741,000	DAU	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%		29,241,000	
2.2. 1	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan	4	Unit	0	DAU	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan	2	Unit	2,931,000	
2.2. 2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	29,741,000	DAU	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	26,310,000	
2.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		60,177,000	DAU	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		60,177,000	
2.3. 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12	Laporan	600,000	DAU	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12	Laporan	600,000	

2.3. 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	12	Laporan	12,900,000	DAU	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	12	Laporan	12,900,000	
2.3. 3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	46,677,000	DAU	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	46,677,000	
2.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%		13,204,000	DAU	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%		13,704,000	
2.4. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipeliharana dan dibayarkan pajaknya	1	Unit	7,158,000	DAU	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipeliharana dan dibayarkan pajaknya	1	Unit	7,158,000	
2.4. 2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8	Unit	2,342,000	DAU	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8	Unit	2,842,000	
2.4. 3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipeliharana / direhabilitasi	1	Unit	3,704,000	DAU	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipeliharana / direhabilitasi	1	Unit	3,704,000	
JUMLAH					262,000,000		262,000,000					
KELURAHAN EMPAGAE												
1.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%		128,730,000	DAU	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%		128,730,000	
1.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%		128,730,000	DAU	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%		128,730,000	

1.2.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Lembaga Kemasyarakatan	1,000,000	DAU	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Lembaga Kemasyarakatan	1,000,000	
1.2.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1	Unit	121,730,000	DAU	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	121,730,000	
1.2.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	12	Laporan	6,000,000	DAU	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Laporan	6,000,000	
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		133,270,000	DAU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		133,270,000	
2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	100 %		31,878,000	DAU	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	100 %		31,878,000	
2.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	Paket	2,550,000	DAU	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	Paket	2,550,000	
2.1.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Laporan	2,318,000	DAU	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Laporan	2,318,000	
2.1.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Laporan	3,149,500	DAU	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Laporan	3,149,500	
2.1.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12	Laporan	7,003,000	DAU	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12	Laporan	7,003,000	

2.1. 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	16,857,500	DAU	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	16,857,500	
2.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%		28,511,000	DAU	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%		27,011,000	
2.2. 1	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan	4	Unit	2,381,000	DAU	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan	8	Unit	4,836,000	
2.2. 2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	26,130,000	DAU	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	22,175,000	
2.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		59,677,000	DAU	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		59,677,000	
2.3. 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12	Laporan	600,000	DAU	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12	Laporan	600,000	
2.3. 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	12	Laporan	12,400,000	DAU	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	12	Laporan	12,400,000	
2.3. 3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	46,677,000	DAU	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	46,677,000	
2.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%		13,204,000	DAU	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%		14,704,000	

2.4. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Unit	7,158,000	DAU	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Unit	7,158,000	
2.4. 2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8	Unit	2,342,000	DAU	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8	Unit	3,842,000	
2.4. 3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1	Unit	3,704,000	DAU	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1	Unit	3,704,000	
JUMLAH					262,000,000							262,000,000
TOTAL					3,700,307,870							3,806,374,114

BAB V

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Watang Sidenreng dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Sidenreng Rappang di Kecamatan Watang Sidenreng.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) dikecamatan Watang Sidenreng. Ruang lingkup perencanaan Pembangunan di kecamatan Watang Sidenreng ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi pelaksanaan rencana Kerja (Renja) tahun 2026, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan Status Hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekwensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis kesemua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan didalam Renstra yang sudah dibuat
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikator yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam arti semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi Renstra kesemua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan kearah yang sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan direncana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.

5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhaan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat terwujud, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Amin.

Empagae, 3 September 2025

CAMAT WATANG SIDENRENG



H. ARNOLD BARAMULI, ST.,M.Adm.KP.
NIP. 197302082008021001